

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendukung terlaksananya tujuan pembangunan berkelanjutan. Keberadaan pariwisata sangat erat hubungannya dengan Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mempunyai 17 tujuan atau *goals* yang harus dicapai diantaranya yaitu: (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan pemukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Dari ke-17 tujuan atau *goals* terangkum dalam 4 pilar. *Pertama*, Pilar Pembangunan Sosial yang meliputi tujuan SDGs pada poin 1, 2, 3, 4, dan 5 dimana pilar ini menekankan pada pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara. *Kedua*, Pilar Pembangunan Ekonomi yang meliputi tujuan SDGs pada poin 7, 8, 9, 10, dan 17 dimana pilar ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui pembangunan berkelanjutan, peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih dan terjangkau dan didukung kemitraan. *Ketiga*, Pilar Pembangunan Lingkungan yang meliputi tujuan SDGs pada poin 6, 11, 12, 13,

14, dan 15 dimana pilar ini menekankan pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. *Keempat*, Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yang meliputi tujuan SDGs pada poin 16 dimana pilar ini menekankan pada kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Keberadaan pariwisata akan membantu tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun di sisi lain, jika pariwisata tidak dikelola dengan baik dan benar, maka pariwisata akan menjadi penghambat dalam mencapai tujuan tersebut. Pariwisata yang dikelola dengan baik dan tepat akan mampu mencapai berbagai tujuan seperti pengentasan kemiskinan, pengentasan kelaparan, modal untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, munculnya inovasi dan industri penunjang, serta mendorong konsumsi dan produksi yang lebih bertanggungjawab. Tidak hanya itu saja, pariwisata juga akan mendorong adanya kesetaraan gender melalui partisipasi dari berbagai pihak dalam kegiatan pariwisata.

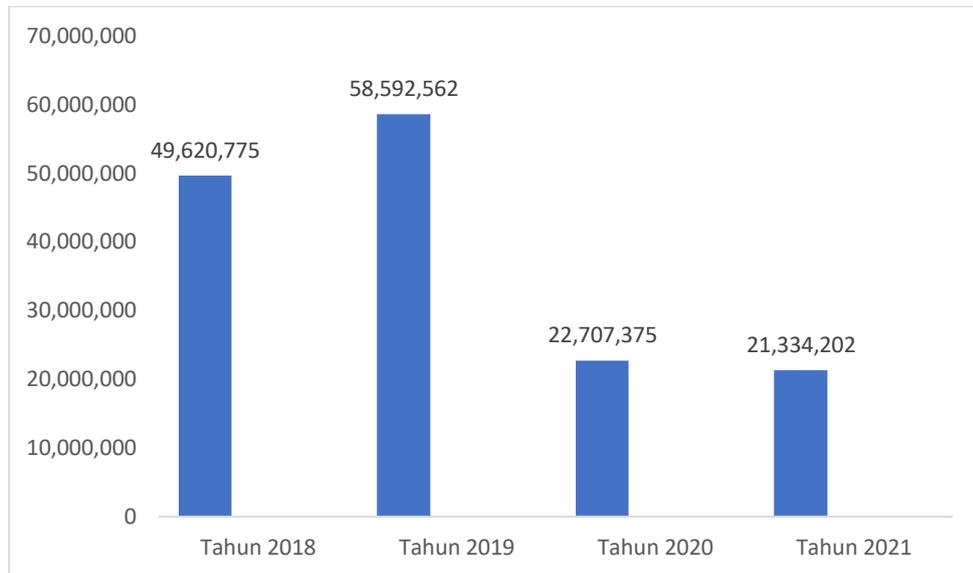
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata merupakan rangkaian aktivitas kepariwisataan yang dibantu oleh sarana serta pelayanan yang disuguhkan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pariwisata merupakan salah satu kegiatan dalam industri pelayanan dan jasa yang dapat diandalkan oleh Indonesia untuk mendongkrak devisa negara selain sektor migas. Mengingat selama ini Indonesia lebih mengandalkan potensi dari migas sebagai sumber pendapatan Negara, akan tetapi hingga saat ini migas yang ada akan selalu berkurang dan

mungkin akan habis. Oleh karena itu pariwisata diharapkan mampu menjadi sektor yang bisa diandalkan untuk menggantikan potensi migas.

Modal utama untuk mengembangkan dan membangun pariwisata adalah sarana yang dikelola daerah, seperti kekayaan alam, seni budaya, adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan keberagaman potensi kepariwisataan. Tujuan pembangunan pariwisata tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan devisa negara, akan tetapi juga untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja, serta membantu aktivitas industri pendukung dan sub sektor lainnya. Seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang manfaat pariwisata, pemerintah menyadari bahwa industri pariwisata bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang apabila dikelola dan didukung dengan baik melalui kesadaran lingkungan. Untuk dapat mencapai upaya tersebut, diperlukan adanya suatu kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pusat agar dapat terkoordinasi dalam konservasi sumber daya alam di daerahnya.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang dijadikan sebagai daerah tujuan wisata dan menikmati maraknya perkembangan industri pariwisata. Sebagai salah satu destinasi wisata penunjang pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan di Indonesia, Jawa Tengah sudah melakukan berbagai macam kegiatan dalam upaya pengembangan pariwisata. Jawa Tengah memiliki banyak kekayaan alam, seni dan budaya yang telah dikemas dan dijadikan aset wisata baik domestik maupun internasional yang pada akhirnya akan menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

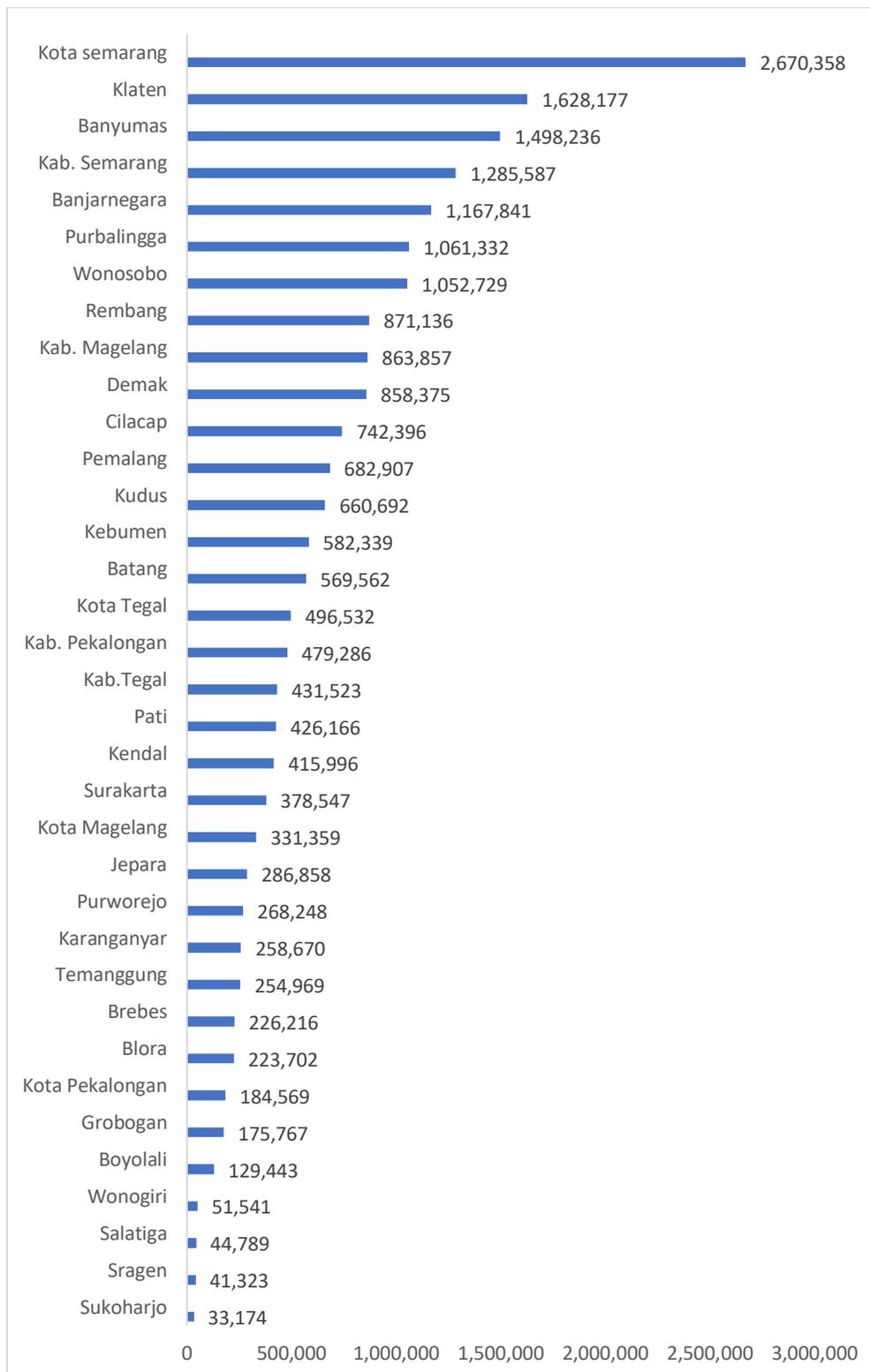
Gambar 1. 1 Data Jumlah Wisatawan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan data dari Gambar 1.1 di atas, jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara pada tahun 2018 sebanyak 49.620.775 wisatawan dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 58.592.562 wisatawan. Namun pada tahun 2020 hingga tahun 2021, jumlah wisatawan terus mengalami penurunan menjadi sebanyak 22.707.375 wisatawan pada tahun 2020 dan 21.334.202 wisatawan pada tahun 2021. Penurunan jumlah wisatawan yang mengunjungi Provinsi Jawa Tengah ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang mulai muncul pada bulan Maret 2020 yang akhirnya berujung pada terbitnya berbagai regulasi guna menekan penyebaran Covid-19 namun berdampak buruk pada sektor pariwisata.

Gambar 1. 2 Data Jumlah Wisatawan Per-Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan data dari Gambar 1.2 di atas, Kabupaten Purworejo berada pada urutan ke-24 untuk jumlah kunjungan wisatawan terbanyak yang berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah wisatawan sebanyak 268.248 wisatawan. Meskipun demikian, banyak sekali potensi daya tarik wisata di Kabupaten Purworejo yang sangat menarik untuk dikunjungi. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota yang berada di Kota Purworejo. Kabupaten Purworejo berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo di sebelah Utara, Samudera Hindia di sebelah Selatan, Kabupaten Kulon Progo di sebelah Timur dan Kabupaten Kebumen di sebelah Barat. Kabupaten Purworejo memiliki wilayah pesisir di Selatan dan pegunungan Menoreh di Utara dan Timur. Sehingga dengan kondisi tersebut, tidak mengherankan apabila Kabupaten Purworejo mempunyai berbagai macam potensi wisata alam yang sangat menarik untuk dikunjungi. Selain terkenal dengan wisata alamnya, di Kabupaten Purworejo juga terdapat tempat wisata menarik lainnya, yaitu wisata budaya, wisata seni, wisata kuliner dan berbagai situs sejarah. Besarnya potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Purworejo, jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dan tepat, tentunya akan menjadi destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan.

Gambar 1. 3 Data Jumlah Wisatawan Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2021



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, 2022

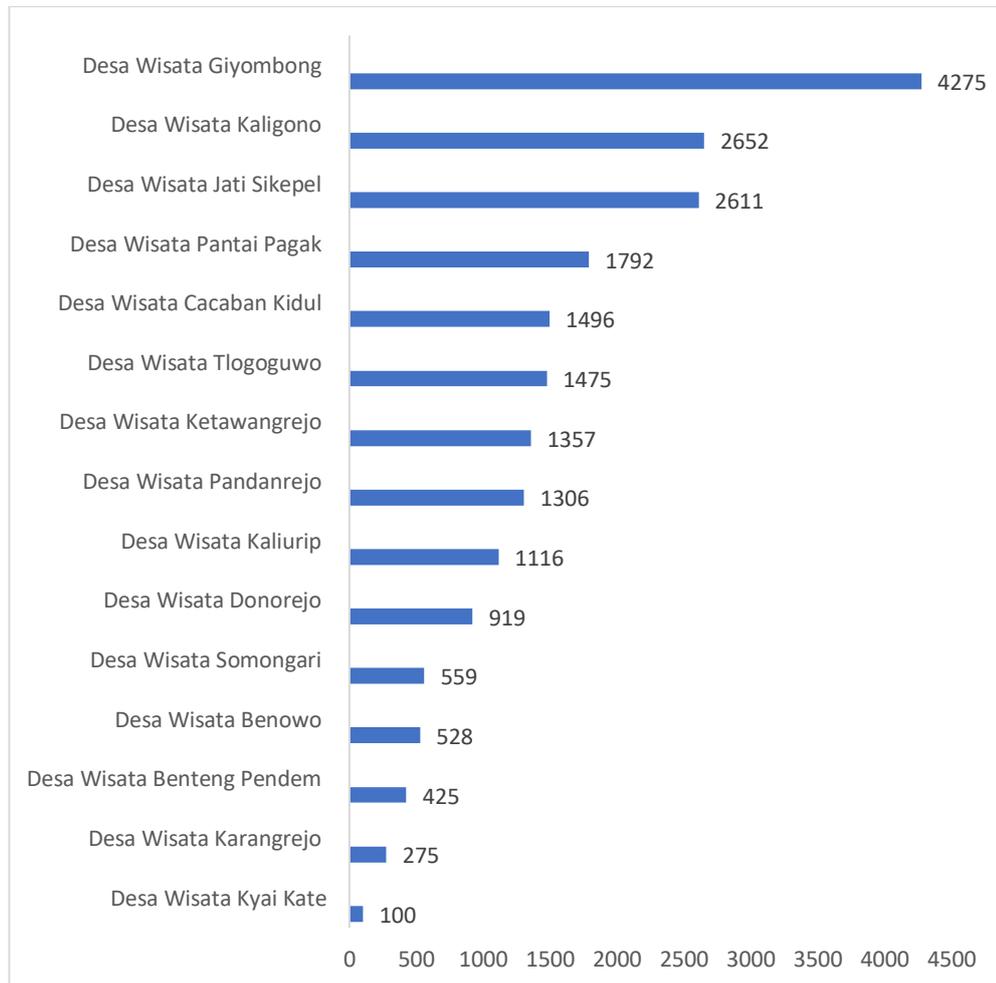
Berdasarkan data dari Dinporapar Kabupaten Purworejo, jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2019. Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2019 yakni sebanyak 1.484.837 wisatawan, kemudian mengalami peningkatan sebanyak 371.615 wisatawan dibanding tahun 2018 yakni sebanyak 1.113.222 wisatawan. Namun, dalam dua tahun, yakni tahun 2020 dan 2021 jumlah wisatawan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 hanya sebanyak 492.411 wisatawan dan tahun 2021 hanya sebanyak 248.541 wisatawan. Menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Purworejo ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang mulai muncul pada bulan Maret 2020 yang berujung pada terbitnya berbagai regulasi guna menekan penyebaran Covid-19 namun berdampak buruk pada sektor pariwisata.

Secara umum, Kabupaten Purworejo lebih dikenal dengan wisatanya yaitu Pantai Dewaruci Jatimalang, Goa Seplawan, Museum Tosan Aji dan lain sebagainya. Namun tidak hanya itu saja, saat ini Kabupaten Purworejo juga mempunyai banyak potensi desa wisata yang tidak kalah menarik dan unik untuk dikunjungi sebagai tempat wisata atau belajar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010 – 2025 sudah ditetapkan strategi untuk meningkatkan potensi sumber daya lokal, termasuk pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.

Desa wisata didefinisikan sebagai suatu kesatuan atraksi, akomodasi, dan sarana tambahan yang disuguhkan dalam sistem kehidupan sosial yang terpusat dengan adat istiadat yang ada (Nuryanti, 1993). Lebih lanjut desa wisata dapat dijelaskan sebagai sebuah desa dengan potensi wisata yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti transportasi dan juga penginapan (*homestay*). Keunikan dan daya tarik yang dimiliki oleh desa wisata yaitu kehidupan di pedesaan yang memiliki keunikan tersendiri yang tidak akan bisa ditemukan di daerah perkotaan (Chasanah & Nurcahyanto, 2019).

Saat ini terdapat 15 (lima belas) desa wisata di Kabupaten Purworejo yang sudah dikelola oleh pemerintah. Dari banyaknya desa wisata yang ada di Kabupaten Purworejo ini memiliki ciri khasnya masing-masing seperti pengembangan wisata alamnya, ekonomi kreatif, maupun *culture* atau budayanya. Dengan adanya ciri khas dari masing-masing desa tersebut nantinya akan ditawarkan ke dalam beberapa paket wisata yang bertujuan untuk menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung ke desa tersebut.

Gambar 1. 4 Data Jumlah Kunjungan Desa Wisata di Kabupaten Purworejo Tahun 2021



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, 2022

Dari banyaknya desa wisata yang dimiliki Kabupaten Purworejo, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai partisipasi masyarakat pada sebuah desa wisata yang dikenal masyarakat Kabupaten Purworejo yakni Desa Wisata Tlogoguwo. Hal ini didasarkan pada Renstra dari DINPORAPAR Kabupaten Purworejo dimana terdapat permasalahan dalam kepariwisataan di Kabupaten Purworejo. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya yaitu: 1) belum optimalnya pengembangan dan penataan destinasi wisata; 2) belum optimalnya pemasaran pariwisata dan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata; dan 3)

masih sedikitnya pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI dan sertifikat kompetensi. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Purworejo ini salah satu penyebabnya ialah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya mengembangkan pariwisata.

Desa Wisata Tlogoguwo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. Banyak potensi yang ada di desa ini, seperti wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan/minat khusus. Potensi wisata yang terdapat di Desa Wisata Tlogoguwo ini tersebar di 7 (tujuh) RW dengan ciri khasnya yang berbeda-beda. Untuk wisata alamnya terdapat Hutan Pinus Kalilo, Taman Batu Goa Sikantong, Hutan Pinus Sigendol, Goa Anjani, Curug Tawing dan juga edukasi perkebunan. Kemudian untuk wisata budaya terdapat kesenian kuda lumping, ndolalak, karawitan, baritan dan rajaban. Kemudian untuk daya tarik wisata buatan/minat khusus terdapat Embung Tlogoguwo, kolam renang pegunungan, edukasi budidaya kambing etawa, dan edukasi pengolahan susu kambing etawa.

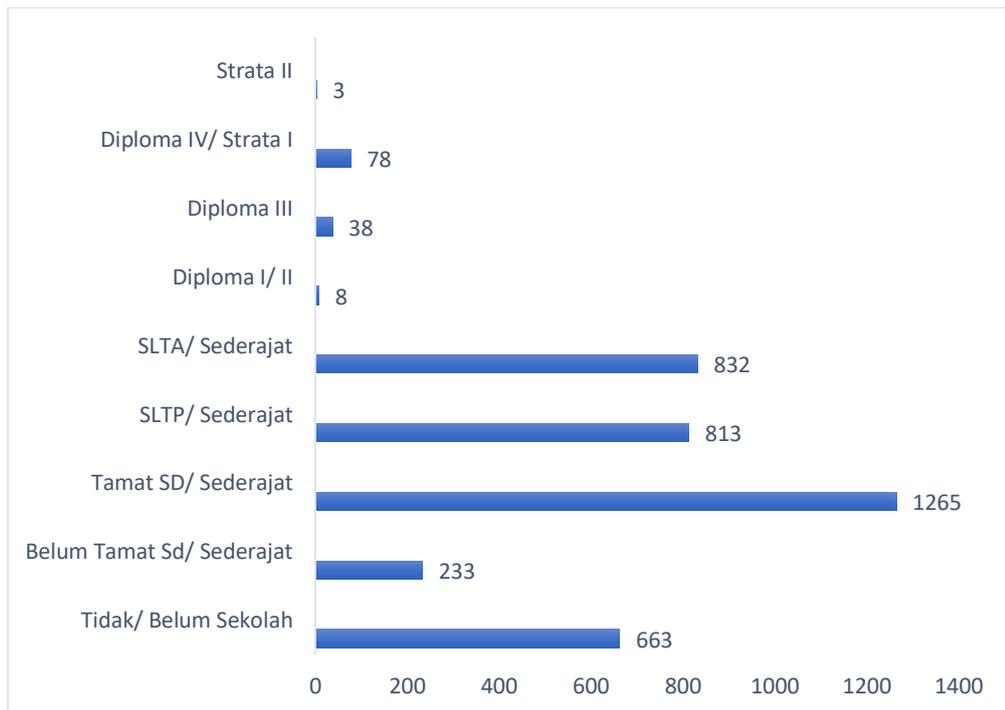
Sejak awal terintisnya Desa Wisata Tlogoguwo, desa ini terus berupaya untuk mengeksplorasi setiap potensi yang dimilikinya. Salah satu usaha dalam mengembangkan desa wisata yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat di desa wisata itu sendiri. Sehingga keikutsertaan dari masyarakat sangat penting dalam pengelolaan desa wisata. Sumaryadi (dalam Chasanah & Nurcahyanto, 2019) mengemukakan bahwa partisipasi merupakan peran dari seseorang ataupun sekelompok orang di dalam suatu proses pembangunan, baik berupa pernyataan ataupun dalam bentuk kegiatan yang memberikan berbagai bentuk sumbangan seperti tenaga, waktu, pikiran, pengalaman, materi, serta ikut

menikmati dan memanfaatkan hasil yang didapat dari program pembangunan. Keterlibatan masyarakat setempat memungkinkan masyarakat mengetahui semua aspek keberhasilan pembangunan, yang pada gilirannya menimbulkan apresiasi masyarakat setempat atas hasil yang telah dicapainya.

Keberhasilan sebuah desa wisata bergantung pada bagaimana partisipasi masyarakat berkontribusi untuk menyukseskan desa wisata tersebut. Partisipasi yang ideal ialah partisipasi berbasis kesadaran yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, bukan partisipasi yang didorong atau dipaksakan oleh pihak lainnya (Chasanah & Nurcahyanto, 2019). Namun pada kenyataannya yang terjadi sampai saat ini keberadaan dari sebuah desa wisata masih menemukan berbagai macam permasalahan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan setiap potensi wisata yang dimiliki oleh desa tersebut.

Berdasarkan hasil pra-survey yang dilakukan pada bulan Januari 2022 dengan Ketua Pokdarwis Makarti Muktitama Desa Wisata Tlogoguwo, partisipasi masyarakat di Desa Tlogoguwo dirasa masih kurang optimal, hampir seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwasanya Desa Tlogoguwo ini sudah menjadi desa wisata, akan tetapi masih banyak sekali diantara mereka yang tidak ikut berpartisipasi untuk melakukan pengembangan potensi desa wisata. Selain itu, terdapat juga beberapa permasalahan lain yang ditemui di lapangan yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Tlogoguwo.

Gambar 1. 5 Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tlogoguwo



Sumber: Sistem Informasi *Online* Desa Tlogoguwo, 2022

Dari Gambar 1.3 di atas, mayoritas penduduk Desa Tlogoguwo adalah lulusan Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 1265 (32,16%) jiwa. Kemudian dibawahnya terdapat lulusan SLTA/Sederajat, yakni mencapai 832 (21,15%) jiwa, sedangkan untuk Diploma dan Sarjana hanya sebanyak 127 (3,23%) jiwa. Sebagian besar masyarakat Desa Tlogoguwo berpendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) saja. Hal itu tentu saja dapat menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan di Desa Tlogoguwo masih tergolong sangat rendah. Dengan melihat tingkat pendidikan yang masih sangat rendah ini, menyebabkan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan Desa Wisata Tlogoguwo masih rendah.

Gambar 1. 6 Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Desa Wisata



Sumber: Dokumentasi Desa Tlogoguwo, 2020

Kegiatan pembinaan dan pelatihan Desa Wisata Tlogoguwo melibatkan partisipasi dari pengurus Pokdarwis, masyarakat Desa Tlogoguwo, serta pemerintah desa selaku pengisi dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan Desa Wisata tersebut. Pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan di Desa Wisata Tlogoguwo memiliki tujuan agar nantinya masyarakat dapat memberdayakan dan memanfaatkan potensi wisata yang dimiliki dalam rangka mengembangkan desa wisata. Dalam kegiatan ini, tidak sampai 80% warga yang diundang dapat hadir dalam kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mengembangkan Desa Wisata Tlogoguwo masih rendah.

Gambar 1. 7 Usaha Pembuatan Anyaman oleh Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Desa Tlogoguwo, 2018

Selain potensi wisata alam yang menjadi suatu daya tarik wisata di Desa Wisata ini, terdapat juga daya tarik wisata lainnya seperti usaha kerajinan anyaman yang nantinya dapat dijadikan sebagai cinderamata yang memiliki fungsi ekonomi sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Desa Wisata Tlogoguwo. Namun sangat disayangkan, masyarakat masih banyak yang bersikap pasif sehingga yang ikut berpartisipasi dalam usaha pembuatan anyaman hanya sedikit jumlahnya. Rata-rata yang ikut berpartisipasi dalam usaha pembuatan anyaman ini sudah berusia lanjut dan tidak terlihat satu pun remaja yang berpartisipasi di dalamnya.

Gambar 1. 8 Gapura Pintu Masuk Desa Wisata Tlogoguwo



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Wisata Tlogoguwo, infrastruktur yang dimiliki oleh Desa Wisata Tlogoguwo juga kurang terawat. Seperti pada gapura pintu masuk desa wisata tersebut, terlihat bahwa belum ada keistimewaan khusus dan terkesan masih sangat sederhana. Selain itu, kondisi dari gapura juga sudah tidak lagi terawat dimana tulisan pada gapura tersebut sudah mulai memudar yang disebabkan karena kurangnya perhatian dari masyarakat di desa. Tidak hanya pada gapura pintu masuk desa wisata saja, kondisi jalanan di Desa Wisata Tlogoguwo masih banyak yang rusak. Kondisi jalan di Desa Wisata Tlogoguwo tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. berikut ini.

Gambar 1. 9 Kondisi Jalan di Desa Wisata Tlogoguwo



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada akses jalan menuju sejumlah lokasi objek wisata di Desa Wisata Tlogoguwo, dapat dilihat bahwa kondisinya masih sangat memprihatinkan. Masyarakat dan pemerintah desa terkesan abai terhadap kerusakan akses jalan menuju lokasi objek wisata yang ada di desa tersebut. Kondisi jalan tersebut masih belum beraspal dan cenderung tidak rata dan sempit. Dengan kondisi jalan yang seperti itu maka membuat kendaraan besar seperti bus pariwisata tidak bisa melewati jalan tersebut. Kemudian, jika musim hujan tiba jalan tersebut menjadi becek dan sulit untuk dilalui kendaraan.

Gambar 1. 10 Lahan Parkir di Desa Wisata Tlogoguwo



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Suatu kawasan desa wisata juga membutuhkan banyak fasilitas guna mendukungnya sebagai destinasi wisata. Berbagai fasilitas yang dimiliki oleh desa wisata ini akan membantu para wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata dengan lebih mudah. Masyarakat dalam menyediakan fasilitas seperti prasarana umum untuk menunjang kegiatan pariwisata juga masih kurang. Salah satu prasarana umum yang terdapat di Desa Wisata Tlogoguwo yaitu lahan parkir bagi kendaraan wisatawan yang berkunjung, dimana lahan parkir yang tersedia di Desa Wisata Tlogoguwo ini belum memadai. Lahan parkir yang tersedia di Desa Wisata Tlogoguwo hanya mampu untuk menampung kendaraan roda dua dan mobil pribadi, namun untuk parkir bus pariwisata belum tersedia di desa wisata ini.

Fasilitas lain yang terdapat di Desa Wisata Tlogoguwo adalah toilet umum. Toilet umum biasanya digunakan oleh para wisatawan untuk buang air kecil ataupun buang air besar.

Gambar 1. 11 Kondisi Toilet Umum di Desa Wisata Tlogoguwo



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada salah satu toilet umum yang ada di Desa Wisata Tlogoguwo, memiliki kondisi toilet yang kotor dan kurang layak untuk dipakai. Seharusnya toilet umum ini memiliki kebersihan yang terjamin karena merupakan suatu fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh para wisatawan. Kondisi toilet umum yang kotor ini tentu saja akan membuat wisatawan merasa tidak nyaman dan dapat menjadi sumber penyebaran penyakit.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan di sekitar wilayah desa yang masih kurang ini juga menyebabkan banyaknya sampah yang berserakan di sekitar wilayah desa tak terkecuali di lokasi objek wisata. Kebersihan ini merupakan salah satu unsur dari Sapta Pesona. Sapta Pesona didefinisikan

sebagai suatu kondisi yang harus dipenuhi agar dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah di Indonesia.

Gambar 1. 12 Kondisi Tempat Sampah di Desa Wisata Tlogoguwo



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Wisata Tlogoguwo, penyediaan tempat sampah masih kurang memadai. Masih banyaknya sampah yang berserakan dan menumpuk di wilayah Desa Wisata Tlogoguwo terutama di beberapa lokasi objek wisata di sebabkan oleh kurangnya partisipasi dari masyarakat Desa Tlogoguwo dalam menjaga kebersihan. Kondisi ini membuat pengunjung merasa tidak nyaman karena pasalnya sampah-sampah tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu aktivitas pengunjung untuk berwisata.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dalam upaya mengembangkan desa wisata. Pengembangan desa wisata melalui partisipasi masyarakat di Desa Wisata Tlogoguwo sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata sehingga nantinya bisa menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung. Namun, yang terjadi hingga saat ini masih

ditemukan berbagai macam permasalahan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Tlogoguwo. Sehingga, penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Tlogoguwo sangat menarik dan penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Wisata Tlogoguwo. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah mengapa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Tlogoguwo masih rendah?

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan Desa Wisata Tlogoguwo.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan Desa Wisata Tlogoguwo.
3. Kurang mendukungnya infrastruktur dalam pengembangan Desa Wisata Tlogoguwo.
4. Ketersediaan lahan parkir di desa wisata yang kurang memadai.
5. Kebersihan fasilitas umum seperti toilet umum dan penyediaan tempat sampah yang kurang memadai.

1.2.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Tlogoguwo?
2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Tlogoguwo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Tlogoguwo.
2. Menganalisis apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Tlogoguwo.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperbanyak wawasan mengenai partisipasi masyarakat untuk mengembangkan pariwisata sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
- b. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis yakni penelitian terkait dengan partisipasi masyarakat didalam sektor pariwisata.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Mengimplementasikan keilmuan yang diperoleh semasa kuliah dalam bentuk karya ilmiah tentang partisipasi masyarakat untuk mengembangkan desa wisata.

b. Manfaat Bagi Pemerintah

Memberikan informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan Desa Wisata Tlogoguwo sebagai daya tarik wisata yang menarik.

c. Manfaat Bagi Masyarakat Desa Wisata Tlogoguwo

Memberikan informasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Desa Wisata Tlogoguwo sebagai desa wisata seperti yang diharapkan.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Pemaparan penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan serta acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori untuk mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti, peneliti tidak menemukan judul penelitian terdahulu yang sama dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Dengan penelitian terdahulu yang diacu oleh peneliti digunakan untuk dijadikan referensi dan memperkaya bahan kajian untuk penelitian. Penelitian yang dikaji difokuskan pada penelitian yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata.

1. Penelitian dari Nur Chasanah dan Herbasuki (2019) “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Tingkir Lor Salatiga)”. Tujuannya yakni mengkaji partisipasi masyarakat dalam mengelola Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan teori tingkatan partisipasi menurut Sherry R. Arnstein (1969) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah partisipasi masyarakat belum berjalan maksimal karena rendahnya pemahaman masyarakat dan peresmian desa wisata memiliki sifat sementara sehingga perlu meningkatkan komitmen dari

stakeholder agar bisa menjadi wisata yang banyak dikunjungi. Relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dalam penelitian ini hanya membahas mengenai tingkatan partisipasi masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga membahas mengenai bentuk partisipasi masyarakat.

2. Penelitian dari Yusuf Manggala dan Moch. Mustam (2017) “Analisis Faktor-Faktor dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Wisata Genting Kabupaten Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkatan partisipasi masyarakat serta apa saja faktor yang memiliki hubungan dengan partisipasi warga di Genting. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini ialah tingkat atau tahapan partisipasi menurut Wilcox (1988) dengan menerapkan explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitiannya yakni semakin banyak warga berusia muda, semakin tinggi tingkat pendidikan warga, semakin banyak warga, semakin dekat jarak rumah warga ke pemerintahan desa, kepemimpinan yang baik di desa dan penggunaan komunikasi maka akan tingkat partisipasi masyarakat akan semakin meningkat. Relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu jika penelitian ini meneliti tentang faktor yang memiliki hubungan dengan partisipasi warga. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

3. Penelitian dari Nikita Amalia VGA, dkk (2018) “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata serta Dampaknya terhadap Perekonomian Warga di Desa Tulungrejo Kota Batu”. Tujuannya yakni melihat atraksi wisata di desa wisata Tulungrejo, mengkaji ragam partisipasi masyarakat, dan mengkaji pengaruh negatif dan positif pengembangan wisata untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan teori bentuk partisipasi dari Huraerah (2008) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu kegiatan wisata sudah diikuti oleh partisipasi dari hampir seluruh masyarakat, melakukan persiapan untuk masuk industri wisata, terdapat beberapa bentuk partisipasi, dan meningkatkan ekonomi sekitar. Rekomendasinya adalah meningkatkan sosialisasi dari POKDARWIS desa dalam rangka membujuk masyarakat yang belum terlibat dengan menyelenggarakan pagelaran adat yang didalamnya terlibat semua masyarakat lalu melakukan promosi agar menarik pengunjung. Relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dalam penelitian ini mengkaji tentang pengaruh negatif dan positif pengembangan wisata untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Penelitian dari Desnamita, dkk (2020) “Partisipasi Masyarakat dalam Kreativitas Pengembangan Wisata Kampung Tematik (Studi Kasus:

Kampung Pulo Geulis, Kota Bogor, Jawa Barat)”. Tujuannya yakni untuk menganalisis tahapan dari kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat serta jenis partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat di Kampung Pulo Geulis. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini yakni tahapan kreativitas menurut Landry (2008) dan jenis partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1980) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah tahapan kreativitas dari masyarakat di Kampung Pulo Geulis sudah sampai pada tahap membentuk ide kreatif serta tersedianya sarana atau ruang basis bagi aktivitas yang kreatif. Kemudian untuk partisipasi masyarakatnya yang paling terlihat ialah partisipasi dalam tahap pelaksanaan serta pengambilan manfaat. Relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dalam penelitian ini mengkaji tentang tahapan dari kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji bentuk dan tingkatan partisipasi masyarakat.

5. Penelitian dari Pramadika Ramanda, dkk (2019) “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata Koridor Jalur Lintas Selatan Kabupaten Malang”. Tujuannya yakni untuk menganalisis peran suatu kelompok dalam upaya mengembangkan wisata alam sepanjang koridor jalur lintas selatan dari Balekambang-Sendang Biru. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini ialah teori bentuk atau tipe partisipasi menurut Wazir (1999) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil

penelitiannya adalah bentuk partisipasi warga di Koridor Wisata Pantai JLS Malang Selatan lebih banyak menggunakan model partisipasi fungsional dimana masyarakat secara bersama berusaha untuk mengembangkan merencanakan serta memberi masukan untuk kegiatan wisata sebagai wujud apresiasinya terhadap lembaga lokal yang mengurus pariwisata akan tetapi pengambilan keputusan tetaplah di dominasi oleh pihak diluar anggota masyarakat tersebut. Relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada teori yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan teori bentuk atau tipe partisipasi menurut Wazir (1999), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teori bentuk partisipasi menurut Midgley.

6. Penelitian dari Dewa Putu Bagus Pujawan Putra (2020) “Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Carangsari”. Tujuannya yaitu mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Carangsari di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Teori yang diterapkan di dalam penelitian ini yaitu teori tingkat partisipasi dari Arnstein (1969) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah tingkat partisipasi consultation bersifat semu & pasif dengan model top down, rendahnya partisipasi dari masyarakat karena faktor internal serta eksternal walaupun mendapatkan pengaruh ekonomi. Relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa

wisata. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dalam penelitian ini hanya membahas mengenai tingkat partisipasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tidak hanya tingkatan partisipasi namun juga bentuk partisipasi.

7. Penelitian dari Ilham Junaid dan Nur Fauziah (2019) “Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pariwisata di Dusun Rammang-Rammang Kabupaten Maros”. Tujuannya yakni untuk menganalisis tingkatan partisipasi warga di Dusun Rammang-Rammang dalam suatu kegiatan kepariwisataan serta memberi saran langkah penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan teori tingkatan partisipasi menurut Pretty (1995) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok yaitu partisipatif dan non partisipatif. Kelompok non partisipatif perlu di dorong dengan memaksimalkan peranan dari Pokdarwis serta menjalankan koordinasi yang baik dengan pihak luar agar diberi pembinaan dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada teori tingkatan partisipasi yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan teori tingkatan partisipasi menurut Pretty (1995), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu teori tingkatan partisipasi menurut Sherry R. Arnstein (1969).
8. Penelitian dari Fira Julia (2020) “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Karangjahe Kecamatan Rembang

Kabupaten Rembang Tahun 2020”. Tujuannya yakni melihat tahapan serta bentuk partisipasi dalam manajemen Pantai Karangjahe. Penelitian ini menggunakan teori tahapan partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1980) dan bentuk partisipasi dari Pasaribu dan Simandjuntak dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitiannya yaitu partisipasi memberikan dampak baik walaupun sejumlah tahapan dan bentuk partisipasi yang belum maksimal yaitu penyusunan rencana, implementasi, dan evaluasi, serta partisipasi dalam bentuk keahlian & harta benda. Maka perlu peningkatan motivasi dari stakeholder kepada rakyat sehingga dapat menciptakan karya yang menjadi keunikan. Relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian ini mengkaji tentang tahapan dalam manajemen Pantai Karangjahe. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji bentuk dan tingkatan partisipasi dalam pengembangan desa wisata.

9. Penelitian dari Aghnia Norma Septiani (2019) “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata (Studi di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto).” Tujuannya yakni untuk melihat partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Kampung Majapahit sebagai suatu desa wisata. Dalam penelitian ini menggunakan teori tahapan partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1979) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah partisipasi diterapkan dengan lancar dengan melibatkan masyarakat

sebagai SDM dalam pembangunan dan pengembangan Kampung Majapahit serta partisipasi dalam pengambilan manfaat ditunjukkan dengan pemanfaatan Kampung Majapahit. Relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian ini meneliti tentang tahapan partisipasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang bentuk dan tingkatan partisipasi.

10. Penelitian dari Ni Made Devy Karnayanti dan I Gusti Agung Oka Mahagangga (2019) “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi di Kabupaten Badung”. Tujuannya yakni melihat partisipasi warga dalam manajemen desa wisata Bongkasa Pertiwi di Kabupaten Badung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan menurut Terry (2006) dan teori partisipasi menurut Tosun (1999) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana, melakukan organisir, implementasi, dan kontrol karena kurangnya sumbangsih manajer desa wisata, kualitas SDM yang rendah, serta rendahnya kerjasama masyarakat. Relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada teori yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan teori partisipasi menurut Tosun (1999), sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh peneliti menggunakan teori bentuk partisipasi menurut Midgley dan teori tingkatan partisipasi menurut Arnstein.

1.5.2 Administrasi Publik

1.5.2.1 Definisi Administrasi Publik

Administrasi publik berasal dari 2 kata antara lain administrasi dan publik. Administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi *ad* (insentif) serta *ministrare* (melayani), sehingga administrasi yaitu melayani menggunakan insentif. Administrasi terdiri dari arti secara luas dan sempit. Sempit berarti aktivitas menulis atau aktivitas perkantoran, sedangkan luas berarti kerjasama kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu kata publik memiliki pengertian umum, rakyat, negara, serta banyak orang.

Pengertian mengenai administrasi publik sangat beragam dan banyak sekali ahli dunia yang memberikan definisi. Chandler & Plano (dalam Pasolong, 2014:7) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah langkah memberdayakan sumber daya manusia secara koordinatif dan terorganisir untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan melakukan pengelolaan terhadap suatu keputusan dalam kebijakan publik. Kemudian Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:6), memberikan definisi bahwa administrasi publik merupakan suatu kombinasi lengkap dari teori dan praktek yang memiliki tujuan untuk mempromosikan mengenai tugas dari pemerintah dalam keterkaitannya dengan rakyat serta untuk mendorong kebijakan publik menjadi lebih responsif terhadap semua kebutuhan sosial. Lebih luas Felix a. Nigro dan Lloyd G. Nigro (dalam Keban, 2014:5) menjelaskan administrasi publik sebagai kerja sama yang dilakukan pada

sekelompok lingkungan pemerintah yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk merumuskan suatu proses politik dan/atau merumuskan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini cara kerja administrasi publik dalam perumusan kebijakan tentunya berbeda dengan dengan swasta, namun tetap memiliki kaitan kuat dengan kelompok swasta dan individu dalam upaya memberikan suatu pelayanan.

Berdasarkan pendapat pakar di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi publik yaitu suatu aktivitas kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah secara sistematis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menggapai tujuan telah ditetapkan sebelumnya secara efektif, efisien dan rasional.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Berikut ini paradigma-paradigma dalam Administrasi Negara menurut Islamy (dalam Sri Suwitri, 2009:16):

1. Paradigma I: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Politik wajib memfokuskan pada kebijakan atau kebutuhan rakyat, sedangkan administrasi memfokuskan pada pelaksanaan kebijakan, hal ini merupakan ungkapan dari Frank J. Goodnow dan Leonard D. White dalam "*Politics and Administration*" (1900). Lokus paradigma ini adalah berpusat pada birokrasi pemerintah, sedangkan fokusnya adalah suatu cara yang wajib dikembangkan dalam administrasi publik jarang didiskusikan secara detail.

2. Paradigma II: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma ini mulai mengenalkan aspek administrasi sebagai fokus administrasi negara. Aspek tersebut yaitu *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan juga Budgeting* yang bisa diimplementasikan secara umum. Sedangkan locusnya belum dijelaskan secara jelas. Tokoh utama dalam paradigma ini adalah Gullick dan Urwick, serta Willoughby.

3. Paradigma III: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Lokusnya terletak pada birokrasi pemerintahan, kemudian untuk fokusnya menjadi tidak jelas karena aspek administrasi memiliki kekurangan. Sehingga administrasi mengalami zaman mencari identitas karena ilmu politik sangat mendominasi di dalam ilmu administrasi negara.

4. Paradigma IV: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Aspek manajemen yang sudah ada lebih dikembangkan secara terfokus. Fokusnya adalah implementasi metode modern, kajian manajemen, dan perilaku organisasi. Paradigma ini terbagi menjadi 2 fokus perkembangan antara lain berfokus pada berkembangnya ilmu administrasi murni yang dibantu dengan ilmu psikologi sosial dan berfokus pada kebijakan negara.

5. Paradigma V: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-sekarang)

Fokus dan lokus dari paradigma ini sudah memiliki kejelasan. Fokusnya yaitu teori kebijakan negara, organisasi, dan manajemen; sedangkan lokusnya yaitu permasalahan dan kebutuhan umum.

6. Paradigma VI: *Reinventing Government*

Caiden (1982) menjelaskan bahwa administrasi publik harus melakukan reformasi yang disebut dengan reformasi, reorganisasi, dan revitalisasi administrasi serta birokrasi. Donald F. Kettl (1993) dalam Warella (2008:8) menjelaskan bahwa fokus paradigma yaitu prosedur pasar serta langkahnya dimana relasi antar badan publik dengan masyarakat diilhami sebagai pertukaran seperti yang ada pada prosedur pasar. Paradigma ini atau sering disebut *New Public Management* (NPM) yang selanjutnya menerapkan aspek pemerintahan yang baik. Pada dasarnya NPM terdiri dari kebijakan negara dan manajerial. Konsentrasi NPM terdiri dari Kebijakan Publik dan Manajemen Publik.

NPM memiliki teori bisnis sendiri yaitu *New Public Service*. Administrasi negara wajib: 1) memberikan layanan kepada rakyat dan bukan customer, 2) mementingkan kebutuhan negara, 3) mementingkan kepentingan rakyat daripada wirausaha, 4) harus berpikir sistematis dan demokratis, 5) menyadari sulitnya mengimplementasikan akuntabilitas, 5) melayani daripada mengendalikan, dan 7) berpandangan bahwa manusia adalah manusia, bukan hanya produktivitas saja. Denhart, Denhart, (2003) berpandangan bahwa ikut serta pemerintah harus menuju ke arah yang

baik sehingga NPM pentingnya NPS dalam birokrasi yang menjadi pedoman good governance.

7. Paradigma VII: *Good Governance*

Seluruh aktor harus ikut serta dalam proses formulasi dan penerapan kebijakan sehingga dapat tercipta good governance. Akuntabilitas, efektif dan efisien, partisipasi, transparansi, rule of law, orientasi konsensus, responsif, dan equity and inclusiveness merupakan karakteristik pemerintahan yang baik.

Sedarmayani (2003: 7-8) menjelaskan bahwa implementasi *reinventing government* wajib dibarengi dengan karakteristik pemerintahan yang baik sesuai UNDP, antara lain:

1. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
2. Saling Keterbukaan (*Interrelated*)
3. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)
4. Partisipasi (*Participation*)
5. Aturan Hukum (*Rule of Law*)
6. Visi Strategis (*Strategic Vision*)
7. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)
8. Berkeadilan (*Equity*)
9. Transparansi (*Transparency*)
10. Akuntabilitas (*Accountability*)

Paradigma ini menganggap bahwa birokrasi yang baik yaitu yang berfokus kepada rakyat dan tidak pada birokrat atau dengan anggapan lain pemerintah yang lagi mereformasi dan mengimplementasikan

reinventing governance. Aspek pemerintahan yang baik harus didasarkan sehingga implemtasinya terhindar dari KKN.

Sehingga paradigma yang memiliki keterkaitan dengan judul yakni *Good Governance*, karena partisipasi merupakan salah satu prinsip paradigma ini. Dimana warga berperan aktif dalam suatu interaksi sosial, ekonomi, serta politik dengan mempunyai hak suara pada pembuatan keputusan untuk proses pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengembangkan Desa Wisata Tlogoguwo, hal ini disebabkan Desa Wisata sangat bergantung pada warga sekitarnya demi tercapainya tujuan Desa Wisata di Kabupaten Purworejo yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

1.5.3 Manajemen Publik

Hyde dan Shafritz (dalam Nabila, 2016:5) mengemukakan bahwa manajemen dan kebijakan publik adalah 2 area administrasi publik yang tumpang tindih. Cara membedakannya yaitu jika kebijakan negara mencerminkan satu rangkaian otak dan syaraf sedangkan manajemen publik menggambarkan rangkaian jantung dan peredaran dalam tubuh. Artinya manajemen publik adalah langkah memberdayakan sumber daya organisasi yang sejalan dengan kebijakan publik.

Wilson (dalam Keban, 2014:100) meletakkan 4 aspek studi administrasi publik, yaitu:

1. Pemerintah berperan untuk menjadi manajer inti organisasi.
2. Peran lembaga eksekutif menjadi fokus inti.

3. Penelurusan aspek & metode manajemen yang bagus sebagai inti pengembangan keahlian administrasi.
4. Teknik melakukan banding sebagai alat ilmu dan pengembangan area administrasi publik.

Manajemen publik adalah penelitian antar ilmu aspek umum organisasi. Manajemen publik adalah campuran dari menyusun rencana, melakukan fungsi organisasi, dan mengendalikan tugas manajemen dengan mengelola SDM, finansial, data & informasi, dan sumber daya politik. Sehingga manajemen publik yakni kinerja kompleks dari pemerintah untuk menyuguhkan layanan dan publik mempunyai rasa tercapainya seluruh kebutuhannya dengan kinerja atau aturan. Pengaturannya bukanlah murni untuk hanya mencapai keuntungan organisasi melainkan melayani rakyat sehingga harus memperhatikan semua prinsip manajemen yang menjadi penunjang kinerja organisasi.

1.5.4 Partisipasi Masyarakat

1.5.4.1 Definisi Partisipasi Masyarakat

Asal kata partisipasi dari bahasa Latin yaitu *participare*, artinya mengambil bagian atau ikut andil. Sastrodipoetra (dalam Rohman, 2009:45), partisipasi merupakan keikutsertaan secara langsung yang diikuti dengan rasa sadar dan akuntabilitas terhadap kebutuhan organisasi untuk menggapai tujuan. Sedangkan menurut Charly (dalam Rohman, 2009:46), partisipasi merupakan keikutsertaan jiwa manusia atau kelompok masyarakat yang memberi dorongan terkait atas kemauan individu menurut keahlian sumber daya yang tersedia untuk ikut andil dalam langkah

menggapai tujuan secara tanggung jawab. Lebih lanjut Tjokroamidjojo (dalam Rohman, 2009:46) mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan dalam langkah menentukan tujuan, aturan, kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Menurut Siagian (1985:26), partisipasi adalah aspek utama dalam pembangunan, partisipasi masyarakat yang lebar dan sah dibutuhkan karena akhirnya masyarakat melakukan banyak aktivitas dalam pembangunan. Masyarakat banyak andil utama sekaligus sebagai target pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional berkaitan dengan prinsip hak dan kewajiban (Soetomo, 2011). Partisipasi adalah hak setiap rakyat untuk ikut serta dengan menggunakan kesempatan yang ada dalam langkah pembangunan selain berhak memanfaatkan hasil dari pembangunan. Partisipasi pembangunan adalah hal wajib karena seluruh rakyat wajib terlibat menggondong beban pembangunan dan mendukung keberhasilan pembangunan.

Koentjaraningrat (dalam Ainur Rohman, 2009:46) menjelaskan 2 maksud tentang partisipasi yaitu:

1. Partisipasi yakni keterlibatan masyarakat dalam kegiatan dan proyek pembangunan khusus.
2. Partisipasi didefinisikan sebagai individu di luar kegiatan dalam pembangunan. Partisipasi yaitu keterlibatan rakyat dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan langkah masyarakat atau kelompok organisasi dalam ikut serta andil untuk membawa pengaruh pada tahap penyusunan rencana, implementasi, dan kontrol kebijakan yang membawa

pengaruh kehidupan secara langsung (Sumarto and Hatifah, 2004:17). Sedangkan menurut Pasaribu dan Simanjutak (dalam Siti Fatimah, 2012:10), partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat artinya meniru pemerintah, karena pemerintah adalah formulator, implementator, dan aktor inti pembangunan. Harapannya masyarakat bisa terlibat, karena digelar dan didanai oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Menurut Soetrisno (1995:222), terdapat 2 (dua) macam definisi terkait partisipasi yang saat ini beredar di masyarakat:

1. Para perencana pembangunan resmi di Indonesia memberikan definisi terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai bentuk dukungan dari masyarakat terhadap suatu rencana atau proyek pembangunan yang sedang dirancang dan ditetapkan oleh para perencana. Menurut definisi ini, tingkat partisipasi masyarakat diukur dengan kesediaan untuk membagi biaya dan energi masyarakat di dalam pelaksanaan proyek-proyek dalam pembangunan publik.
2. Definisi yang dapat diterapkan secara luas adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan ialah suatu bentuk kerjasama yang kuat diantara perencana pembangunan dan warga negara dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan. Menurut definisi ini, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dinilai dari kesediaan masyarakat untuk membayar biaya pembangunan, tetapi juga dari ada atau tidaknya hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah serta tujuan dari proyek yang dibangun di wilayah mereka.

Menurut Soetrisno (1995), ada beberapa aspek yang wajib terdapat di dalam partisipasi masyarakat:

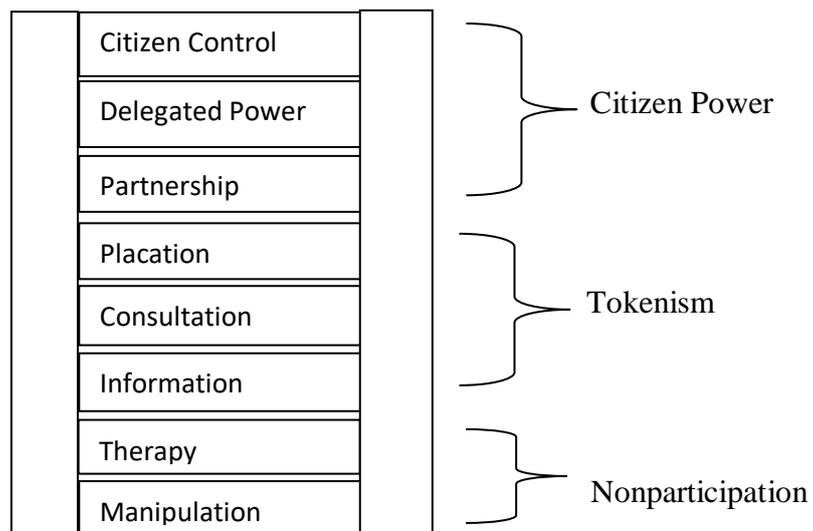
1. Keinginan rakyat untuk terlibat secara mandiri dalam aktivitas.
2. Aktivitas itu dilaksanakan rakyat untuk menggapai tujuan umum.
3. Agar menggapai tujuan itu dilaksanakan secara menyeluruh atau dilaksanakan dengan prinsip manajemen.

Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses peran serta masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi dalam suatu kegiatan mulai dari menyusun rencana, implementasi, & penilaian dalam rangka menggapai tujuan.

1.5.4.2 Bentuk dan Tingkatan Partisipasi

Tingkatan partisipasi menurut (Arnstein, 1969) dalam tulisannya *A Ladder of Citizen Participation* yaitu:

Gambar 1. 13 Tingkatan Partisipasi Menurut Arnstein



Sumber: Arnstein (1969), *Eight Rungs on The Ladder of Citizen Participation*

2 (dua) tingkatan terbawah masuk ke dalam jenis bukan partisipasi, yaitu terapi dan manipulasi. Tingkat ini memiliki tujuan tidak untuk menyuruh masyarakat ikut serta dalam penyusunan rencana dan implementasi kebijakan, namun ada probabilitas untuk pemerintah dalam mengedukasi masyarakat.

Tingkat kedua ada 3 tingkatan yang terdiri dari dialog dengan publik. Tingkat ini terlihat banyak kondisi antara lain komunikasi satu arah dari pemerintah kepada warga (tingkatan *information* yaitu poster, pamflet, laporan tahunan, dan pengumuman) atau koordinasi 2 arah (*consultation* yaitu dengar pendapat, musrenbang, dan survey sikap), sampai keterlibatan (*placation* yaitu keikutsertaan masyarakat untuk menjadi anggota organisasi tapi hak memutuskan tetap ditangan pemerintah).

Tingkat teratas yaitu memberi masyarakat posisi yang lebih baik dalam pengambilan kebijakan. Masyarakat kerjasama langsung dalam formulasi kebijakan dan menyediakan layanan. Tingkat *partnership* artinya adanya kerjasama/kemitraan antara masyarakat dan pemerintah, tingkat *delegated power* artinya pemerintah menyediakan wewenang pada masyarakat untuk mengurus kebutuhannya sendiri, lalu tingkat *citizen control* yaitu masyarakat sudah mempunyai kewenangan secara penuh untuk mengelola berbagai kegiatan atau program yang sebelumnya telah disepakati bersama tanpa adanya campur tangan lagi dari pemerintah.

Menurut Rahmena (dalam Rohman, 2009:45) menyatakan partisipasi ialah “*the action or fact of partaking, having a forming a part of*”. Maksudnya partisipasi memiliki sifat transitif atau intransitive, atau

memiliki moral atau tidak memiliki moral. Arti tersebut mengandung sifat terpaksa atau bebas atau manipulatif atau secara langsung. Partisipasi transtitif berfokus pada tujuan sedangkan intrasitif jika subjek memiliki peran tanpa ada tujuan jelas. Partisipasi memiliki sisi bermoral jika tujuan yang akan dicapai sejalan dengan etika. Artinya partisipasi mengandung stigma positif dan sebaliknya.

Menurut Muluk (dalam Rohman, 2009:45), partisipasi dibedakan dari sifat langsung atau manipulatif. Partisipasi yang dimanipulatif memiliki kandungan maksud anggota partisipasi tidak merasakan rasa keterpaksaan untuk melaksanakan suatu, tapi anggota partisipasi dibimbing untuk ikut andil oleh kekuatan diluar perannya. Maka partisipasi ragam ini diberi julukan *teleguided participation*. Midgley (dalam Rohman, 2009:45), partisipasi secara langsung adalah “*a voluntary and autonomus action on the part of the people to organize and deal with their problems unaided by government or other external agent*”.

Menurut Kramer (dalam Rohman, 2009:48), partisipasi memiliki pengertian ikut serta dalam langkah pengambilan kebijakan pembangunan. Partisipasi berfokus pada mengembangkan program masyarakat yang diposisikan sebagai pelanggan inti dari pembangunan fasilitas daerah. Kepentingan dan rekomendasi masyarakat harus didengar oleh pemerintah untuk menyusun rencana dan menyuguhkan layanan pembangunan daerah. Partisipasi dilangsungkan berdasarkan nilai keadilan sosial dan dalam rangka tersedia lapangan pekerjaan yang berkinerja untuk masyarakat.

Berbeda dengan tahapan yang dijelaskan oleh Kramer dan Arnstein, Tjokroamidjojo (1992) mengelompokkan partisipasi menjadi 3 tahapan yaitu:

1. Partisipasi atau keterlibatan dalam langkah menentukan jalan, cara dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
2. Partisipasi untuk menanggung beban dan akuntabilitas dalam melakukan aktivitas pembangunan.
3. Partisipasi untuk mengambil pengaruh positif pembangunan secara berkeadilan.

Menurut Midgley (dalam Rohman, 2009:49), partisipasi masyarakat memberikan kontribusi *the direct involvement of ordinary people in local affairs*. Partisipasi masyarakat artinya tersedianya ikut serta masyarakat umum dalam kepentingan setempat secara sukarela. Partisipasi masyarakat mengarah pada pengertian dari resolusi PBB tahun 1970 yaitu : “Menciptakan harapan yang memungkinkan rakyat untuk memberi kontribusi aktif dalam langkah pembangunan dan memberi pengaruh serta merasakan pengaruh positif pembangunan tersebut secara adil” Midgley (dalam Rohman, 2009:50)

Midgley (dalam Rohman, 2009:50), mengungkapkan terdapat 2 pandangan tentang batasan partisipasi masyarakat yaitu pertama, menurut *United Nation Economic and Social Council Resolution 1929*. Resolusi tersebut menjelaskan bahwa partisipasi wajib melibatkan manusia secara langsung dan demokratis dalam hal sebagai berikut:

1. Sumbangsihnya terhadap usaha pembangunan.

2. Pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan, serta penerapan program pembangunan sosial dan ekonomi.
3. Penerimaan manfaat secara merata.

Berdasarkan teori di atas, partisipasi digolongkan jadi 2 antara lain *authentic participation* (partisipasi otentik) yang mengarah pada tercapainya indikator tersebut. Apabila salah satu indikator itu tidak dapat memenuhi maka ini sering dikenal dengan *pseudo participation* (partisipasi semu).

Berdasarkan berbagai penjelasan dari beberapa ahli di atas, terdapat beberapa teori yang mengemukakan mengenai bentuk partisipasi dan tingkatan partisipasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori bentuk partisipasi menurut Midgley yang dibedakan menjadi dua yakni partisipasi otentik (*authentic participation*) dan partisipasi semu (*pseudo participation*). Kemudian untuk teori tingkatan partisipasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori menurut Arnstein, namun hanya 6 tingkatan partisipasi saja yang diteliti yaitu *Tokenism (Information, Consultation, Placation)* dan *Citizen Power (Partnership, Delegated Power, Citizen Control)*.

1.5.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Tjokroamidjojo (1992:226), mengatakan ada tiga elemen yang menjadi perhatian dalam partisipasi pembangunan, yaitu:

1. Kepemimpinan

Fungsi pemimpin dalam suatu negara yaitu sangat menentukan untuk memberdayakan partisipasi warga dalam pembangunan memerlukan pemimpin yang memiliki legitimasi.

2. Komunikasi

Pikiran kebijakan serta suatu rencana hanya dapat semangat jika masyarakat tahu dan mengerti karena menggambarkan beberapa kepentingan dan sumbangan masyarakat yang kemudian dapat diterima oleh warga bahwa output dari rencana kebijakan dapat berhasil diterima oleh masyarakat.

3. Pendidikan

Level pendidikan yang cukup dapat membawa pengaruh kepada rasa sadar yang tinggi bagi masyarakat dengan mempejelas pengembangan meneliti terhadap tujuan pembangunan yang sifatnya nasional. Rasa sadar dan keahlian untuk mengembangkan individu dan masyarakat tergantung pada adanya kualitas pendidikan.

Menurut Plumer (dalam Slamet, 1994:97), faktor yang membawa pengaruh kepada warga untuk terlibat partisipasi, antara lain:

1. Pengetahuan Terhadap Program

Pondasi pengetahuan membawa pengaruh kepada rakyat dalam mengerti atau tidak terhadap langkah dan ragam partisipasi.

2. Pekerjaan masyarakat

Terkadang manusia dengan level jabatan tertentu akan memberikan waktu luang untuk berpartisipasi ataupun tidak karena tersedia konflik antara komitmen atas jabatan dengan rasa ingin memberikan partisipasi.

3. Tingkat pendidikan dan buta huruf

Faktor ini membawa banyak pengaruh terhadap rasa mampu rakyat untuk berpartisipasi dan mengerti untuk melakukan partisipasi.

4. Jenis kelamin

Terdapat opini bahwa jenis kelamin memiliki pandangan yang berbeda terhadap inti permasalahan dan rasa untuk berpartisipasi.

5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu

Rakyat yang majemuk khususnya dari latar belakang agama dan budaya jadi penentu cara partisipasi yang dipakai, seringkali agama memiliki pandangan yang berbeda.

6. Faktor-faktor eksternal

Pemangku kepentingan adalah aktor yang membawa pengaruh dan posisi penting dalam suatu keberhasilan program.

Kemudian menurut Conyers (dalam Ainur Rohman, 2009:49), terdapat 2 (dua) faktor yang memberikan pengaruh atas berhasil atau gagalnya dalam partisipasi warga dalam suatu perencanaan pembangunan, diantaranya yakni:

1. Hasil keikutsertaan dari masyarakat itu sendiri, masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi langsung dalam suatu kegiatan perencanaan jika mereka merasa dalam kegiatan tersebut tidak berpengaruh terhadap rencana akhirnya nanti.
2. Masyarakat tidak memiliki keinginan untuk berpartisipasi langsung dalam suatu kegiatan yang menurut mereka tidak menarik atau tidak mendatangkan manfaat yang dapat mereka rasakan.

Faktor yang membawa pengaruh partisipasi masyarakat dapat membuat kesuksesan suatu program, komunikasi dalam partisipasi untuk memahami pengembangan desa wisata serta mempunyai peluang untuk didengar opininya meski tidak ikut serta secara langsung dalam pengambilan kebijakan, serta pentingnya kerjasama pemerintah dengan LSM dalam penentu keberhasilan program.

1.5.5 Konsep Pariwisata

Pariwisata yaitu aktivitas yang sifatnya dinamis dan terdapat banyak orang secara individual atau organisasi serta memberdayakan banyak area usaha. Menurut etimologi, pariwisata terbagi jadi 2 kata yakni pari & wisata. Pari artinya banyak atau berkeliling, sedangkan wisata yaitu pergi atau bepergian. Maka menurut Yoeti (1996:112) pariwisata adalah perjalanan yang dilaksanakan banyak waktu dari satu area ke area lain, lalu dalam Inggris dikenal dengan kata *tour*, jika maksud jamak, kata Kepariwisataaan menggunakan *tourisme* atau *tourism*.

Pariwisata merupakan aktivitas wisata yang didukung dengan banyak sarana dan pelayanan yang tersedia oleh rakyat, swasta, dan pemerintah (UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan). Menurut MacIntosh (dalam Yoeti, 2008:9), pariwisata ialah tanda dan relasi yang muncul, mulai dari pertemuan wisatawan, organisasi yang memberi layanan kepada pengunjung, & pemerintah serta rakyat yang menjadi pemilik huan dalam langkah memberikan layanan kepada wisatawan.

Menurut Leiper (dalam Yoeti, 2008:10), pariwisata adalah sistem publik dari aspek yang berkoordinasi dalam lingkungan yang lebar, awalnya

dari aspek orang seperti pengunjung, 3 aspek demografis: negara asal wisatawan, negara tempat transit, serta daerah tujuan wisata, dan aspek ekonomi, yakni kegiatan pariwisata. Aspek tersebut memiliki batasan antara lain:

1. Wisatawan (*tourist*) adalah manusia yang melaksanakan kegiatan pariwisata.
2. Negara asal wisatawan (*generating region*) adalah negara asal wisatawan.
3. Negara transit (*transit region*) adalah negara atau kota transit sebelum wisatawan tersebut sampai atau kembali ke negara tujuan.
4. Daerah tujuan (*destination region*) adalah daerah tujuan wisata yang mana negara atau kota tujuan.
5. Industri pariwisata (*tourist industry*) adalah organisasi yang memberi layanan kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), dan pelayanan (*services*) kepada wisatawan.

Dari pendapat beberapa pakar di atas mengenai pariwisata, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang di waktu senggang yang bermanfaat bagi seseorang itu sendiri maupun bagi para pelaku usaha yang memfasilitasi kegiatan tersebut.

1.5.6 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah cara yang dipakai untuk meningkatkan situasi suatu tempat wisata dan daya tariknya sehingga bisa disinggahi oleh wisatawan dan bisa membawa pengaruh positif untuk rakyat atau pemerintah sekitar (Parturusi, 2001). Diharapkan cara tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sedangkan menurut Pearce

(dalam Nabila, 2016:8), pengembangan pariwisata adalah langkah untuk memperbaiki sarana dan layanan yang dibutuhkan rakyat.

Menurut Yoeti (2016), pengembangan pariwisata memiliki 4 prinsip inti dalam yaitu :

1. Keberlangsungan ekologi adalah suatu pengembangan pariwisata wajib memberi jaminan tersedianya pemeliharaan berbagai sumber.
2. Keberlangsungan kehidupan dan budaya adalah bahwa pengembangan pariwisata wajib menambah fungsi rakyat dalam kontrol sistem kehidupan melalui nilai yang sudah dibuat dan dianut bersama sebagai identitas dan kemandirian.
3. Keberlangsungan ekonomi adalah bahwa pengembangan pariwisata wajib menjamin tersedianya peluang untuk aktor yang terlibat dalam aktivitas ekonomi lewat suatu persaingan yang ketat.
4. Meningkatkan kualitas hidup rakyat sekitar dengan memberikan peluang terlibat dalam pengembangan kepariwisataan.

Menurut Spillane (1987), ada 5 unsur pengembangan wisata yaitu sebagai berikut:

1. *Attractions* (daya tarik) bisa dikelompokkan menjadi dua yakni:
 - a. *Site Attractions* adalah daya tarik yang sifatnya kekal dengan area yang tetap contohnya keindahan alam, kebun atau lahan pertanian, dan sebagainya.
 - b. *Event Attractions* adalah atraksi bersifat sementara dan arenanya bisa berpindah contohnya festival, pertunjukan kesenian daerah, budaya petani dan sebagainya.

2. *Facilities* (fasilitas)

Fasilitas biasanya berorientasi pada daya tarik di suatu area karena fasilitas wajib terletak dengan pusatnya. Fasilitas yang dibutuhkan yaitu penginapan, restoran, toko souvenir, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

3. *Infrastructure* (infrastruktur)

Unsur ini wajib untuk meningkatkan pertumbuhan pariwisata, seperti sistem pengairan, sinyal, terminal, stasiun, sumber listrik, pembuangan sampah atau pembuangan air, fasilitas Kesehatan, jalan raya dan lain-lain.

4. *Transportations* (transportasi)

Transportasi sangat diperlukan karena menjadi penentu jarak dan waktu dalam suatu perjalanan seperti transportasi darat, laut, atau udara adalah aspek inti langsung yang merupakan langkah dinamis tanda pariwisata.

5. *Hospitality* (keramahtamahan)

Keramahtamahan warga dibutuhkan sehingga pengunjung merasa aman dan nyaman saat melaksanakan perjalanan. Maka keramahtamahan bisa menjadi gambaran kesuksesan sistem pariwisata yang baik.

Dari pendapat pakar di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan pariwisata merupakan sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan sarana prasarana, fasilitas pendukung, dan pelayanan guna meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung dan memenuhi kebutuhan dari para wisatawan.

1.5.7 Desa Wisata

Menurut Muljadi (2012:12), desa wisata adalah pengembangan area desa yang memang tidak mengubah yang sudah ada, tapi berfokus pada

pengembangan potensi desa dengan melaksanakan pemberdayaan keahlian di desa yang dimaksudkan sebagai seragam nilai wisata dalam level yang sempit menjadi sekelompok kegiatan wisata dan memfasilitasi serta memenuhi apa yang dibutuhkan wisatawan mulai dari unsur menarik atau sarana tambahan.

Menurut Putra (dalam Ismayanti, 2013:51), desa wisata adalah area pedesaan yang bisa digunakan berdasarkan keahlian beberapa aspek yang mempunyai seragam produk wisata secara sistematis, yang mana desa tersebut menyuguhkan suasana pedesaan yang mempunyai tema pedesaan yang natural, dari aspek kehidupan bermasyarakat budaya dan ekonomi serta adat istiadat yang memiliki keunikan bangunan dan letak desa membuat satu kelompok aktivitas wisata.

Menurut Priasukmana dan Mulyadin (2001), penciptaan desa wisata wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai aksesibilitas yang baik, sehingga wisatawan mudah untuk mengunjungi desa wisata dengan memakai banyak ragam alat transportasi.
2. Wajib mempunyai objek yang memiliki daya tarik contohnya alam, seni budaya, kuliner khas dan lainnya sehingga bisa dikembangkan.
3. Warga serta perangkat desa mendukung penuh desa wisata serta wisatawan.
4. Keamanan yang sudah memenuhi standar.
5. Adanya akomodasi, sinyal, dan SDM cukup.
6. Mempunyai suasana segar & dingin.
7. Mempunyai relasi atau keterkaitan dengan tempat wisata lain yang sudah dipahami oleh masyarakat luas.

Menurut Nuryanti (1993), desa wisata adalah ragam kesatuan antara atraksi, akomodasi, dan sarana tambahan yang disuguhkan dalam satu sistem kehidupan sosial yang terpusat dengan adat yang ada. Ada 3 komponen desa wisata antara lain:

1. Akomodasi yaitu beberapa berasal dari rumah warga sekitar dan unit berkembang atas konsep rumah warga.
2. Atraksi yaitu semua kehidupan sehari-hari warga sekitar serta lokasi desa yang memungkinkan terintegrasinya pengunjung sebagai anggota aktif seperti kursus tari, bahasa, dan lain-lain yang spesifik.
3. Alam yang indah, sifat unik dan langka dari desa wisata itu sendiri.

Sehingga desa wisata yakni sebuah desa yang mempunyai aspek menarik dan memiliki potensi sebagai tempat wisata seperti potensi wisata alam dan budaya tradisional yang memiliki tujuan dalam rangka mengembangkan desa dan mensejahterakan rakyat sekitar.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini akan lebih ditekankan pada bentuk partisipasi, tingkat partisipasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi.

a. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penelitian ini yaitu:

- 1) *Authentic Participation* (Partisipasi Otentik) yang merujuk pada terpenuhinya tiga kriteria sebagai berikut:
 - a. Sumbangsihnya terhadap usaha pembangunan.

- b. Pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan, serta penerapan program pembangunan sosial dan ekonomi.
 - c. Penerimaan manfaat secara merata.
- 2) *Pseudo Participation* (Partisipasi Semu), dapat disebut partisipasi semu apabila salah satu dari kriteria diatas tidak dapat dipenuhi.

b. Tingkat Partisipasi

Tingkat partisipasi dalam penelitian ini adalah derajat partisipasi masyarakat yang meliputi:

- 1) *Tokenism*, yakni suatu tingkatan partisipasi dimana masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan segala pendapatnya, akan tetapi pendapat atau pandangan mereka belum tentu akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan.
 - a. Informasi (*Information*): Pada level ini komunikasi sudah banyak terjadi namun sifatnya masih satu arah dari pemerintah kepada masyarakat akan tetapi masyarakat tidak diberi kesempatan untuk memberikan sebuah *feedback* atau timbal balik.
 - b. Konsultasi (*Consultation*): Pada level ini komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sudah bersifat dua arah dimana sudah terdapat penjangaran aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat namun aspirasi yang disampaikan tersebut belum tentu akan dilaksanakan oleh pemerintah.
 - c. Penentraman (*Placation*): Pada level ini komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sudah terjalin dengan baik serta ada

negosiasi. Artinya warga sudah diberi kesempatan atau ruang untuk memberikan masukan, pendapat atau bahkan ikut merencanakan suatu kegiatan seperti adanya anggota komite kecil dalam program pengembangan desa wisata akan tetapi hak untuk mengambil keputusan tetap ada di tangan pemegang kekuasaan.

2) *Citizen Power*, yakni suatu tingkat partisipasi dimana dalam proses pengambilan keputusan masyarakat sudah memiliki suara bahkan sangat dimungkinkan untuk memiliki wewenang penuh dalam mengelola suatu kebijakan tertentu.

a. Kemitraan (*Partnership*): Dalam tangga ini masyarakat dan pemerintah merupakan sebuah mitra sejajar. Pemerintah telah memberikan kekuasaan kepada masyarakat serta telah terjadi negosiasi antara pemerintah selaku pemegang kekuasaan dengan masyarakat.

b. Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*): Dalam tangga ini pemerintah telah memberikan kewenangannya kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya dalam suatu program kegiatan pengembangan desa wisata.

c. Pengendalian Warga (*Citizen Control*): Dalam tangga ini masyarakat sudah memiliki kewenangan secara penuh untuk mengelola berbagai kegiatan atau program yang sebelumnya telah disepakati secara bersama tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Tlogoguwo dilihat dari gejala-gejala adalah:

1. Pengetahuan Masyarakat
2. Pekerjaan masyarakat
3. Tingkat pendidikan dan buta huruf
4. Jenis kelamin
5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu
6. Faktor-Faktor Eksternal

1.7 Argumen Penelitian

Desa Wisata Tlogoguwo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. Desa ini memiliki berbagai potensi daya tarik wisata baik wisata budaya, wisata alam, maupun wisata buatan yang tersebar di 7 (tujuh) RW. Sejak awal terintisnya Desa Wisata Tlogoguwo, desa ini terus berupaya untuk mengeksplorasi setiap potensi yang dimilikinya. Usaha yang dilakukan untuk mengembangkan Desa Wisata Tlogoguwo salah satunya yakni dengan adanya partisipasi dari masyarakat di Desa Tlogoguwo itu sendiri. Partisipasi didefinisikan sebagai sebuah keterlibatan yang sifatnya spontanitas yang disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga partisipasi masyarakat dalam upaya mengembangkan Desa Wisata Tlogoguwo ini sangat diperlukan.

Namun, yang terjadi hingga saat ini adanya desa wisata masih ditemui berbagai macam permasalahan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan setiap potensi wisata yang ada di dalamnya. Permasalahan-

permasalahan tersebut diantaranya yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang pariwisata, kurangnya kesadaran masyarakat akan wisata serta cenderung masih pasif dalam memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Tlogoguwo, infrastruktur yang masih mengikuti sistem dari musrenbang sehingga tidak ada keistimewaan khusus dalam pembangunannya, ketersediaan lahan parkir yang kurang memadai, kebersihan fasilitas seperti toilet umum yang dimiliki oleh desa wisata yang belum terjamin, dan pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat belum optimal.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif yaitu serangkaian prosedur penelitian yang hasilnya adalah narasi deskriptif berdasarkan hasil observasi terhadap fenomena yang terjadi di lapangan Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005:4). Dalam penelitian deskriptif kualitatif berusaha mengumpulkan data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, dan bukan dalam bentuk angka-angka. Penelitian deskriptif sendiri memiliki tujuan mendeskripsikan secara teratur dengan keakuratan fakta serta memiliki karakteristik tentang suatu populasi atau bidang tertentu.

Metode penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena fenomena yang akan diteliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Tlogoguwo di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo. Peneliti menganggap permasalahan yang akan dianalisis cukup rumit, sehingga data

yang didapatkan dari subjek penelitian bisa membuahkan data deskriptif yang asalnya dari wawancara dan observasi. Lalu peneliti juga perlu paham situasi faktual di lokasi dan melakukan perbandingan teori yang membantu menggambarkan partisipasi masyarakat dalam upaya mengembangkan Desa Wisata Tlogoguwo di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs dalam penelitian merupakan lokasi dimana penelitian dilakukan. Situs penelitian ini berada di Desa Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Penentuan situs berasal pada fenomena banyaknya permasalahan dalam upaya mengembangkan Desa Wisata Tlogoguwo yang disebabkan oleh masih rendahnya partisipasi masyarakat di desa tersebut, sehingga situs yang dipilih oleh peneliti yakni Desa Wisata Tlogoguwo di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo.

1.8.3 Subjek Penelitian

Di dalam penelitian kualitatif, seseorang atau sesuatu dapat digunakan sebagai subjek, karena ia mempunyai info yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian. Subjek penelitian ini juga disebut dengan informan, yaitu orang yang dapat dipercaya untuk menjadi narasumber dalam memberikan informasi yang akurat untuk melengkapi data dalam penelitian (Moleong, 2017:165-166). Dalam penelitian ini, teknik pengambilan informan yang digunakan yakni *snowball sampling*. Teknik *Snowball Sampling* merupakan metode pengambilan sampel sumber data, yang awalnya sedikit jumlahnya, namun lama kelamaan akan menjadi lebih besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data

yang sedikit tidak memberikan data yang memuaskan, sehingga peneliti mencari orang lain untuk digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2012:218-219).

Dalam teknik *snowball sampling* diperlukan bantuan dari informan kunci (key informan). Dalam penelitian ini, peneliti dalam menentukan informan kunci disesuaikan dengan kriteria dalam penetapan informan kunci yakni seseorang yang dianggap paling mengetahui tentang subjek penelitian serta bisa memberikan informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Ketua Pokdarwis Makarti Muktitama Desa Wisata Tlogoguwo.

Tabel 1. 1 Informan dalam Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Dafit Priantoro	Ketua Pokdarwis Makarti Muktitama Desa Wisata Tlogoguwo
2	Mujoko	Kepala Desa Tlogoguwo
3	Sumeri	Ketua Pokdarwis Montez Desa Wisata Tlogoguwo
4	Endah Hanna Rosanti, S.IP., M.Si	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Kabupaten Purworejo
5	Supratman	Pemilik Usaha Peternakan Kambing Ettawa
6	Sutinah	Pemilik Usaha Kuliner
7	Sakiman	Pengelola Embung Tlogoguwo
8	Supardi	Pengelola Hutan Pinus Kalilo

1.8.4 Jenis Data

Lofland (dalam Moleong, 2017:157), menjelaskan bahwa jenis data yang digunakan di dalam penelitian kualitatif yakni berasal dari kata-kata, dokumen, dan informasi terkait lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, jenis

data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis data, yaitu data dalam bentuk kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan teori yang diambil melalui buku dan internet.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini memakai suatu sumber data yang maksudnya yaitu subjek yang medeskripsikan asal data yang didapatkan dan merupakan pencatatan dalam bentuk fakta atau perkataan atau bentuk data yang dipakai sebagai bahan untuk menyusun informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Penelitian ini memakai sumber data yang asalnya dari:

a. Sumber Data Primer

Yakni data yang didapatkan secara langsung dari sumber di situs penelitian melalui wawancara yang dalam bentuk perkataan.

b. Sumber Data Sekunder

Yakni data yang didapatkan secara tidak langsung namun bisa menyumbang bantuan data kepada peneliti yaitu buku pustaka, jurnal dan artikel ilmiah, serta arsip resmi dari desa ataupun dokumen lainnya.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yakni bertemunya dua manusia dalam rangka penukaran informasi dan gagasan lewat menjawab pertanyaan sehingga bisa disimulasikan maksud dalam tema tertentu Esterberg (dalam Sugiyono, 2012:231). Tujuan wawancara untuk penelitian ini yakni

menghasilkan sebanyak-banyaknya keterangan mengenai partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Desa Wisata Tlogoguwo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara yakni wawancara tidak terstruktur, namun tetap sejalan dengan panduan dan langkah yang disetujui. Alasan penggunaan teknik ini adalah peneliti bisa memperoleh informasi terkait dan data yang faktual dari informan yang bertanggung jawab.

b. Observasi

Observasi yaitu aktivitas secara kesengajaan dilaksanakan dalam rangka mengetahui fenomena dan suatu yang terjadi di lokasi penelitian. Peneliti memakai teknik observasi non partisipan yang artinya peneliti bertugas sebagai pengamat mandiri yang tidak melibatkan diri langsung ke dalam kegiatan dari subjek yang sedang diamati, tetapi tetap memakai observasi terstruktur dimana dilaksanakan peneliti dengan menyusun terlebih dulu secara rapi, contohnya letak situs & subjek penelitian yang dipakai serta jadwal observasi.

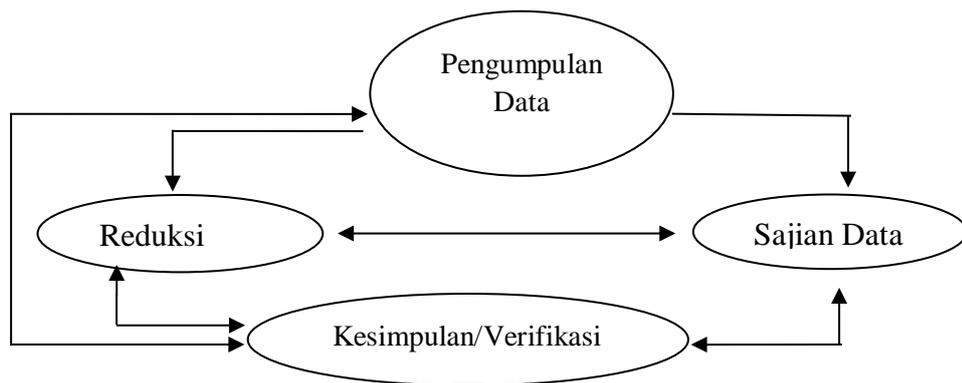
c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012:240), dokumentasi yaitu catatan aktivitas yang pernah lewat dan dikonstruksikan dalam foto, tulisan, atau karya monumental yang berasal dari manusia. Sehingga peneliti mendapatkan data sekunder untuk dipakai yang sejalan dengan fokus penelitian ini, diantaranya foto, data dan arsip resmi yang memiliki keterkaitan dengan Desa Wisata Tlogoguwo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Herdiansyah (2009:158), analisis data yaitu suatu langkah penting yang berada di pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian. Langkah analisis data merupakan langkah yang wajib dilakukan oleh peneliti sehingga penelitian dipertanggungjawabkan keasliannya. Analisis data yakni langkah menelusuri dan penyusunan strukturisasi data yang didapatkan lewat wawancara, catatan lapangan, dan lainnya agar mempermudah pemahaman serta hasilnya bisa dipublikasikan kepada pembaca. Secara sistematis dijelaskan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012:247) yaitu:

Gambar 1. 14 Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model)



1. Reduksi Data

Penelitian lapangan jika dilaksanakan dengan memakan waktu yang panjang akan mengakibatkan jumlah data menjadi banyak dan rumit sehingga diperlukan reduksi data. Menurut Sugiyono (2012:247), mereduksi artinya melakukan perangkuman, melakukan pemilihan suatu pokok, melakukan pemfokusan terhadap suatu penting, lalu mencari topik dan pola. Sehingga dapat menyajikan deskripsi yang jelas serta memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya dan menelusurinya apabila dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilaksanakan menggunakan penjelasan singkat, bagan, relasi antar kelompok atau tulisan naratif yang sejenis sehingga memudahkan peneliti untuk mengerti kejadian, menyusun rencana kerja berikutnya menurut pemahaman yang ada. Penyajian data memiliki tujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengetahui hasil dari penelitian sudah dilaksanakan.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Mengemukakan kesimpulan pertama yang sifatnya sementara nantinya bisa bertransformasi apabila tidak menghasilkan bukti yang membantu untuk langkah pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan didapatkan di langkah pertama dan ada bukti sah disaat peneliti terjun balik ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang didapatkan adalah kesimpulan yang terpercaya. Menurut Sugiyono (2012:252), penguatan kesimpulan fungsi verifikasi itu penting karena penarikan kesimpulan yang dibarengi langkah verifikasi dapat mempermudah kesimpulan mempunyai pondasi valid dalam menyelesaikan suatu masalah

1.8.8 Kualitas Data

Maksud dari data yang absah yaitu dalam rangka mendapatkan level kepercayaan yang berhubungan dengan seberapa dalamnya hasil penelitian, menjawab serta melakukan penjelasan data berikut realita di situs penelitian. Di dalam penelitian kualitatif memiliki uji keabsahan data diantaranya yaitu uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji

confirmability (Sugiyono, 2012:270). Penelitian ini memakai teknik triangulasi dalam rangka melakukan pengujian keabsahan data.

Teknik triangulasi yaitu metode untuk mengecek data dalam rangka melihat pemahaman peneliti mengenai langkah dan hasil yang didapatkan dalam penelitian yang sejalan dengan apa yang dimaksud oleh narasumber atau informan. Menurut Sugiyono (2012:274), ada 3 jenis teknik triangulasi diantaranya:

1. Triangulasi sumber digunakan untuk melakukan pengujian kualitas dan keaslian data melalui pemeriksaan data yang didapatkan dari sejumlah sumber.
2. Triangulasi teknis digunakan untuk melakukan pengujian keabsahan data melalui pemeriksaan lagi data dengan metode baru terhadap sumber data.
3. Triangulasi waktu digunakan untuk melakukan pengujian keabsahan data yang didapatkan pada waktu yang beda.

Sehingga peneliti memakai teknik triangulasi sumber dimana tidak sekedar melaksanakan wawancara bersama satu subjek, tetapi melaksanakan wawancara bersama sejumlah subjek lain untuk mengumpulkan informasi yang valid menurut data di situs penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan validasi dengan melaksanakan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan situasi di tempat penelitian lewat observasi.